

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBANTU MENGATASI MILITAN AL-SHABAB DI SOMALIA TAHUN 2008-2014

Rendy Fahlefy Kusuma¹
NIM. 1202045146

Abstract

From the research conducted, the interest of the United States in helping Somalia create more stable and democratic politics is to re-establish bilateral relations that have existed between the two. The United States considers that the establishment of a stable government will improve the bilateral relations that the two countries once had. Somalia has long been a country of importing machine tools and precious stones at low prices. In addition, Somalia also trades for the plantation sector with legume products to the United States. The Al-Shabab militant movement is a terrorist group affiliated with the Al-Qaeda group. This movement aims to seize power in Somalia and make it an independent Islamic state.

Keywords: *US interests, Al-Shabab militants, Somalia*

Pendahuluan

Meraih kemerdekaan pada 1 Juli 1960, Somalia tidak pernah lepas dari segala jenis permasalahan. Mulai dari bencana kelaparan yang kerap terjadi karena cuaca yang tak stabil, hingga perang saudara yang membuat Negara tersebut berada dalam kondisi yang tidak stabil. Kudeta yang dilakukan oleh beberapa klan di Somalia tersebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Junta Militer yang dipimpin oleh Siad Barre sejak 1969. Kepemimpinan Siad Barre dianggap sama diktatornya dengan pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Abdirashid Ali Shermakrke pada 1967-1969.

Klan-klan yang tercatat terlibat dalam kudeta tersebut ialah Klan Majertin, Klan Ogaden dan Klan Hawiye. Kudeta tersebut berlangsung selama setahun, hingga akhirnya pada tahun 1991, Siad Barre resmi turun dari jabatannya. Namun, paska kudeta tersebut Somalia yang kemudian dipimpin oleh Ali Mahdi Muhammad tidak mengalami perubahan yang lebih baik. Negara tersebut bahkan tidak memiliki pemerintahan pusat yang fungsional disebabkan oleh egoisme dari masing-masing klan. Hingga akhirnya masing-masing pemimpin klan melakukan klaim terhadap sejumlah wilayah di Soamlia. Tak hanya itu, keterlibatan negara-negara disekitar Somalia turut memperkeruh konflik dinegara tersebut. Kekacauan tersebut membuat Amerika Serikat pun terpaksa menutup Kedutaan Besar mereka di Somalia pada tahun 1991.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : rendyhi40@gmail.com

Ketidakmampuan Ali Mahdi Muhammad memusatkan pemerintahan Somalia membuat sekelompok masyarakat menciptakan *Islamic Court Union* (ICU) atau yang biasa disebut Persatuan Pengadilan Islam pada tahun 2000. ICU dibentuk oleh Syekh Ali Dheere yang berkolaborasi dengan kelompok Al Ittihad Al Islamiyah (AIAI). Kelompok tersebut bergerak dengan Syariat Islam dan membangun Somalia agar menjadi negara dengan landasan hukum Islam. ICU juga membentuk suatu kelompok militer yang diberi nama Al-Shabab pada tahun 2006 yang saat awal pembentukannya dipimpin oleh Ibrahim Al-Afghani. Namun perekrutan anggota Al-Shabab menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap mengeksploitasi anak-anak di Somalia untuk kemudian dilatih berperang dan menggunakan senjata. Namun ICU menilai hal tersebut sesuai dengan makna dari Al-Shabab itu sendiri. Dalam Bahasa Arab, Al-Shabab berarti pemuda.

Dalam perkembangannya Al-Shabab bertransformasi menjadi kekuatan militer tersendiri bagi ICU. Al-Shabab bahkan tercatat memiliki lebih dari 9.000 anggota. Hal tersebut membuat pemerintahan resmi Somalia merasa khawatir dengan gerakan militan yang mungkin tercipta. Terbukti pada akhirnya kelompok Al-Shabab ini dilaporkan turut memperkuat ICU dalam Perang Sipil yang terjadi pada tahun 2006. ICU dan Al-Shabab berhasil menguasai Somalia dengan merebut ibukota Somalia, Mogadishu. Namun tidak hanya di Somalia, kelompok Al-Shabab juga beroperasi di beberapa negara lain di sekitar Somalia, seperti Kenya, Ethiopia dan Djibouti.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan dasar yang menentukan perilaku luar negeri suatu negara. Perilaku politik luar negeri yang berdasarkan pada kepentingan nasional akan cenderung mengarah pada upaya-upaya mengejar kekuasaan atau power. Para pemikir realis mengemukakan bahwa *power* merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk memelihara dan mengembangkan kontrol suatu negara terhadap negara lain. Charles O. Lerche dan Abdul Said telah mencoba menjumlahkan kapabilitas negara menurut komponen yang terlihat (*tangible*) dan tidak terlihat (*intangible*). Selain itu, Frederick Schuman berpendapat bahwa dalam sebuah sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan bersama, masing-masing unit harus mencari keselamatan dengan bersandar pada kekuatannya sendiri dan melihat kekuatan tetangga sekitarnya dengan rasa khawatir.

Selain itu kepentingan nasional juga merupakan sebuah konsep mendasar yang terdapat dalam proses berjalannya hubungan internasional. Kepentingan nasional sangat berperan dalam menentukan perilaku suatu negara. Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara.

“Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (security) dari kesejahteraan (prosperity), pasti terdapat serta merupakan

dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.” – T. May Rudy,

“Konsep kepentingan menurutnya diartikan dalam istilah kekuasaan.”- Hans J. Morgenthau

Kepentingan nasional didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni:

1. *Core/basic/vital interest*; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya merupakan contoh dari *core/basic/vital interest* ini.
2. *Secondary interest*; meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya.

Dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah kebutuhan dasar suatu negara dalam mempertahankan negaranya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut. Dalam memenuhi kepentingan nasional diatas, negara merumuskan kebijakannya. Sementara itu konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.

Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama dengan negara-negara lain. Kerjasama yang dibangun oleh satu negara dengan negara lain memiliki kecenderungan untuk dijadikan sebagai alat pencapai kepentingan.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah ekplanatif. Peneliti berusaha untuk menjelaskan bentuk keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu mengatasi militan Al-Shabab di Somalia. Jenis data yang disajikan menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku (*library research*), literatur, serta artikel dari situs-situs terpercaya yang berkaitan dengan permasalahan Al-Shabab di Somalia. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam proposal penelitian adalah studi literatur atau referensi. Literatur yang diperoleh dari buku (*library research*), catatan buku, serta artikel baik media cetak maupun internet. Teknik analisa data menggunakan teknik kualitatif. Dimana informasi yang diperoleh dituangkan dalam bahasa yang dapat menjelaskan hubungan antara data satu dengan data yang lainnya sehingga dapat diperoleh kebenaran atas informasi tersebut.

Hasil Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka pada bagian ini penulis akan menganalisis kebijakan luar negeri yang diambil AS untuk konflik di Somalia. Penulis akan menggunakan Teori Kepentingan Nasional yang dirumuskan oleh sejumlah pakar hubungan internasional.

Somalia tak pernah lepas dari segala jenis permasalahan. Mulai dari bencana kelaparan yang kerap terjadi karena cuaca yang tak stabil, hingga perang saudara yang membuat Negara tersebut berada dalam kondisi tidak stabil. Meraih kemerdekaan pada 1 Juli 1960, Pemerintahan Somalia tercatat pernah mengalami kudeta pada perang sipil yang terjadi sejak tahun 1990. Kudeta yang dilakukan oleh beberapa klan di Somalia tersebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Junta Militer yang dipimpin oleh Siad Barre sejak tahun 1969. Kepemimpinan Siad Barre dianggap sama diktatornya dengan pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Abdirashid Ali Shermakrke pada 1967-1969 (www.britannica.com pada 20 November 2018).

Masyarakat Somalia menganggap pemerintah Barre tak membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan warga Somalia. Konflik pun mulai memanas pada awal 1980-an. Gelombang protes mulai disampaikan masyarakat Somalia. Terlebih terkait mitigasi bencana kelaparan yang tak menjadi perhatian pemerintahan Barre kala itu. Padahal nyaris setiap tahun Somalia mengalami kekeringan yang berimplikasi pada gagalnya panen dan berujung kelaparan.

Tidak hanya gelombang protes terhadap pemerintahan Barre, konflik di Somalia makin memanas saat perepecahan antar etnis yang didasari situasi ekonomi yang tidak stabil mulai memuncak. Somalia dan beberapa negara di Afrika lainnya memang terkenal memiliki macam-macam etnis yang hidup secara homogen (www.cr.org pada 25 September 2019).

Akhirnya pada tahun 1986, Barre memutuskan untuk membentuk pasukan khusus yang dinamai *Red Barret* atau Baret Merah yang mayoritas diisi oleh klan Marehad. Mereka diberi instruksi untuk melindungi Barre dan kroni-kroninya yang menjabat dalam pemerintahan Somalia. Pembentukan pasukan tersebut menimbulkan gelombang protes yang makin besar dari masyarakat Somalia yang berasal dari klan-klan lain. Pasalnya pasukan Baret Merah dituduh menjadi penyebab berbagai tindakan kejam yang terjadi di Somalia. Hal tersebut mendasari munculnya keputusan dari beberapa klan di Somalia untuk membentuk kelompok yang ditujukan melawan pemerintahan Barre (www.un.int pada 25 September 2019).

Setelah bertahun-tahun melawan masyarakatnya sendiri, Siad Barre akhirnya terusir keluar dari Mogadishu. Keluarnya Barre dari Ibu Kota Somalia tersebut membuat klan-klan yang melawan Barre merasa menang dan mendeklarasikan kemenangan mereka atas Siad Barre. Terusirnya Barre dari Mogadishu diperoleh melalui pertarungan yang dilakukan secara terbuka. Pada tahun 1991, Siad Barre resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi presiden yang didudukinya selama lebih dari 2 dekade tersebut (www.un.int pada 25 September 2019).

Namun, paska runtuhnya kepemimpinan Barre tersebut, Somalia kemudian dipimpin oleh Ali Mahdi Muhammad sebagai presidennya. Hanya saja, Somalia tidak

mengalami perubahan yang lebih baik. Negara tersebut bahkan tidak memiliki pemerintahan pusat yang fungsional disebabkan oleh egoisme dari masing-masing klan. Hingga akhirnya masing-masing pemimpin klan melakukan klaim terhadap sejumlah wilayah di Somalia.

Mogadishu usai kudeta Siad Barre



Sumber : nationalgeographic.com

Seperti misalnya Gerakan Nasional Somalia (SNM) yang mendeklarasikan bahwa kawasan Somalia Utara menjadi wilayah mereka dan menyebut kawasan tersebut sebagai Somaliland. Selain USC dan SNM yang sudah memiliki wilayahnya, klan Isaaq bahkan sudah mendeklarasikan mantan Perdana Menteri Somalia era 1960-an, Mohammed Ibrahim Egal sebagai Presiden Somalia yang baru. Sehingga dalam kurun waktu yang nyaris bersamaan, ada dua orang yang dianggap sebagai pimpinan pemerintahan Somalia (www.nationsencyclopedia.com pada 25 September 2019).

Ditengah konflik perebutan wilayah antar masing-masing klan, muncul organisasi Islam bernama Al Itihad Al Islamiyah (AIAI). AIAI sudah mulai terlihat sejak awal tahun 1980-an, namun kelompok tersebut baru mulai menunjukkan diri mereka usai lengsernya Siad Barre. Keberadaan AIAI menarik perhatian, pasalnya selama kekosongan pemerintahan di Somalia, kelompok tersebut memanfaatkan moment dengan menguasai beberapa wilayah dan fasilitas strategis Somalia.

Pelabuhan di kota Kismayo dan Merka pun berhasil mereka kuasai. Hingga akhirnya setahun setelahnya, AIAI mendeklrasikan diri sebagai partai politik. Keputusan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh petinggi AIAI. Kemudian beberapa dari pemimpin tersebut memilih membentuk organisasi Islam sendiri, seperti misalnya Hasan Dahir Aweys yang membentuk *Islamic Court Union* (ICU) (<https://cisac.fsi.stanford.edu> pada 21 Oktober 2019).

ICU resmi dibentuk pada tahun 2000 dengan nama awal *Sharia Implementation Council* (SIC). Tujuannya adalah untuk menerapkan hukum sesuai dengan syariat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Somalia. SIC atau ICU kemudian dipimpin oleh Syekh Sharif Akhmed dengan Hasan Dahir sebagai sekretarisnya. Dibawah

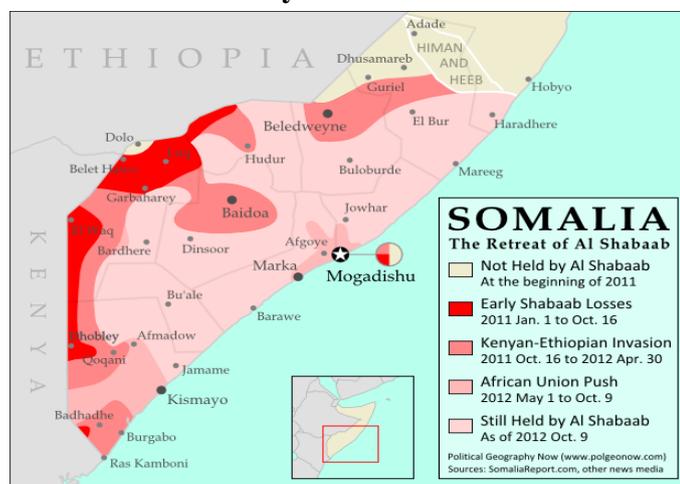
kepemimpinan Syekh Akhmed, ICU berkembang pesat. Keadaan di Somalia diklaim menjadi lebih baik saat syariat Islam diterapkan mulai tahun 2004 di negara tersebut. (Christopher Harnisch:2010).

Namun keberadaan ICU di Somalia mendapatkan pertentangan dari *Transitional Federal Government* (TFG). TFG adalah pemerintah Somalia yang dibentuk atas bantuan negara-negara lain, khususnya Kenya. Bahkan TFG dibentuk di Nairobi, sebuah kota di wilayah Kenya. TFG diakui sebagai pemerintahan yang sah oleh negara-negara lain yang menentang keberadaan ICU. Pasalnya ICU diduga ingin mendirikan negara Islam yang radikal. Pertempuran antara ICU dan TFG pun pecah pada tahun 2006. ICU dilaporkan kalah dan kehilangan wilayahnya di Mogadishu. Namun tak memerlukan waktu lama, ICU berhasil merebut Mogadishu kembali. Setelahnya ICU memutuskan untuk membentuk kelompok militer yang diharapkan bisa memberikan bantuan keamanan (Christopher Harnisch:2010).

Masih ditengah konflik perebutan wilayah antar masing-masing klan, ICU membentuk kelompok militer untuk mengamankan mereka. Pembentukan kelompok militer tersebut dilatarbelakangi konfrontasi yang mereka lakukan dengan Pemerintah Somalia yang bernama *Transitional Federal Government* (TFG). Pertempuran mereka yang terjadi pada tahun 2006 tersebut, membuat ICU harus merelakan Mogadishu yang selama ini mereka kuasai. Karenanya, usai pertempuran tersebut terbentuklah pasukan militer bernama Al-Shabaab.

Al-Shabaab dalam bahasa arab memiliki arti pemuda. Sesuai dengan namanya, Al-Shabaab memang diisi kelompok pemuda yang didoktrin untuk memberikan pengamanan terhadap ICU demi mempertahankan wilayah dan kekuasaan mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, TFG yang mendapat dukungan dari negara-negara lain berhasil memaksa ICU untuk membubarkan diri mereka.

Peta Wilayah TFG tahun 2012



Sumber : polgeonow.com

Hanya saja bubarnya ICU tidak diikuti oleh Al-Shabaab. Al-Shabaab kemudian berubah menjadi kelompok militan. Al-Shabaab mulai menyebarkan ideologi Islam

mereka dengan cara yang cepat. Hingga tak jarang aksi mereka dibarengi dengan tindakan pemaksaan yang berujung pada kekerasan. Bahkan ditahun 2007, Al-Shabaab melalui video yang disebarkannya ke internet, menulis pernyataan bahwa Somalia merupakan musuh bagi mereka. Tidak hanya Somalia, ppihak-pihak yang mendukung TFG sebagai pemerintah Somalia pun ikut menjadi musuh mereka.

Sejak terbentuk tahun 2006, Al-Shabab sudah berkali-kali dilaporkan melakukan serangan ke Pemerintah Somalia. Mekanisme perekrutan kelomok militer Al-Shabab juga sempat menjadi perhatian masyarakat internasional. Pasalnya guna memenuhi kebutuhan mereka akan jumlah pasukan, mereka tak segan menculik anak-anak dan memberikan pelatihan militeristik hingga pendidikan penggunaan senjata.

Bahkan dilaporkan, kelompok Al-Shabaab mempersamai Al-Qaeda dalam melakukan penyerangan di Etiopia. Mereka menilai bahwa sekalipun negara tetangga, Etiopia telah mengkhianati Somalia dengan berkawan dengan AS dan negara-negara barat lainnya. Mereka pun dituding mengkampanyekan pembunuhan bagi lawan-lawan mereka, khususnya pihak asing. Warga Somalia yang diketahui memberikan informasi kepada *Central Intelligence America* (CIA) pun langsung dibunuh oleh tentara Al-Shabaab. Pegawai CIA lainnya pun turut menjadi sasaran bagi kelompok Al-Shabaab bila diketahui identitasnya.

Terbentuknya Al-Shabaab dilatarbelakangi oleh kondisi Somalia yang tak kunjung kondusif. Perang sipil antar klan dan keterlibatan pihak-pihak asing membuat kelompok-kelompok seperti Al-Shabaab mudah berkembang. Dari segi sejarah, seperti yang sudah disebutkan, Al-Shabaab awalnya dibentuk untuk pasukan pengamanan ICU yang saat itu nyaris kalah bertempur saat melawan Pemerintah Somalia. ICU dulunya juga merupakan hasil pecahan dari kelompok islam bernama Al Itihad Al Islamiyah (AIAI).

AIAI sudah mulai terlihat sejak awal tahun 1980-an, namun kelompok tersebut baru mulai menunjukkan diri mereka usai lengsernya Siad Barre. Keberadaan AIAI menarik perhatian, pasalnya selama kekosongan pemerintahan di Somalia, kelompok tersebut memanfaatkan momen dengan menguasai beberapa wilayah dan fasilitas strategis Somalia. Pelabuhan di kota Kismayo dan Merka pun berhasil mereka kuasai.

Setelah keruntuhan Barre, AIAI berafiliasi dengan kelompok separatis Somalia yang berada diwilayah Ethiopia tepatnya kota Ogaden. Afiliasi tersebut dilakukan untuk menyasar Ethiopia dan merebut wilayah negara tersebut.

Kerjasama kedua pihak tersebut berhasil memprovokasi pemerintah Ethiopia untuk menyerang Somalia pada tahun 1996 dengan tujuan untuk membasi gerakan militan AIAI. Hingga akhirnya setahun setelahnya, AIAI mendeklrasikan diri sebagai partai politik. Keputusan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh petinggi AIAI. Kemudian beberapa dari pemimpin tersebut memilih membentuk organisasi Islam sendiri, seperti misalnya Hasan Dahir Aweys yang kemudian membentuk ICU.

ICU resmi dibentuk pada tahun 2000 dengan nama awal *Sharia Implementation Council* (SIC). SIC pada perkembangannya memang mengedepankan aspek

pengadilan Islam berbasis Syariah. Tujuannya adalah untuk menerapkan hukum sesuai dengan syariat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Somalia.

SIC atau ICU kemudian dipimpin oleh Syekh Sharif Akhmed dengan Hasan Dahir sebagai sekretarisnya. Dibawah kepemimpinan Syekh Akhmed, ICU berkembang pesat. Keadaan di Somalia diklaim menjadi lebih baik saat syariat Islam diterapkan mulai tahun 2004 dinegara tersebut. Namun keberadaan ICU di Somalia mendapatkan pertentangan dari TFG. Pertempuran antara ICU dan TFG pun pecah pada tahun 2006. ICU dilaporkan kalah dan kehilangan wilayahnya di Mogadishu. Namun tak memerlukan waktu lama, ICU berhasil merebut Mogadishu kembali.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara non Uni Afrika yang kerap bolak-balik di Somalia. Keterlibatan AS di Somalia bahkan ada sejak tahun 1992, tergabung bersama PBB dalam misi bernama UNOSOM. Presiden AS George H.W Bush mengajukan proposal kepada PBB agar diperbolehkan menjalankan misi perdamaian di Somalia dan tergabung dalam misi pasukan perdamaian PBB tersebut, terlebih saat melihat perang sipil yang tak berhenti di Somalia.

UNOSOM melibatkan sejumlah negara, seperti Australia, Austria, Selandia Baru dan sejumlah negara lainnya. Dalam misi yang dimulai tahun 1992, 4.200 lebih pasukan dari berbagai negara diturunkan, dan 25.000 diantaranya merupakan pasukan milik AS. Sekitar 42,9 juta US Dollar dihabiskan untuk mendanai operasi perdamaian tersebut. Anggaran tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang dianggap resmi oleh para negara anggota PBB.

Sayangnya UNOSOM tak berjalan lancar dan membawa perubahan yang signifikan bagi Somalia. Namun AS tidak menghentikan keterlibatan mereka dalam misi perdamaian PBB. Dalam UNOSOM II yang dilakukan PBB pada tahun 1993 hingga 1994, AS kembali menjadi salah satu negara yang terlibat dalam misi tersebut. Namun dalam catatan yang ada dalam laporan PBB, tidak ada angka pasti berapa jumlah pasukan militer dari AS. Hanya saja melihat dari jumlah negara yang turut terlibat, jumlah pasukan yang diturunkan lebih banyak.

Setidaknya ada 34 negara yang terlibat, termasuk AS, Italia, Perancis, Jerman dan negara-negara yang sudah terlibat dalam UNOSOM I. Meski sama-sama dilakukan selama kurun waktu 1 tahun, UNOSOM II menelan biaya yang lebih besar, yakni 1,6 miliar US Dollar.

Usai menjalankan kedua misi tersebut, keterlibatan PBB dan pasukan perdamaiannya tidak lagi besar dalam konflik di Somalia. Namun AS kembali mengirimkan pasukannya pada awal tahun 2000-an.

AS kembali hadir di Somalia melalui misi perdamaian yang digagas Uni Afrika, AMISOM. AMISOM diusulkan oleh Uni Afrika dan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2006. Operasi mulai dilakukan pada tahun 2007 dengan melibatkan 6 negara dalam misi perdamaian tersebut, Sierra Leone, Uganda, Djibouti, Kenya, Ethiopia dan Burundi.

Kehadiran AS tentunya menimbulkan pertanyaan. Pasalnya misi perdamaian AMISON digagas oleh Uni Afrika dan hanya melibatkan negara-negara di Afrika. Sementara AS jelas bukan merupakan negara anggota Uni Afrika. Bahkan biaya yang dikeluarkan AS dalam misi perdamaian AMISOM tersebut mencapai 3,2 miliar US Dollar selama tahun 2006 hingga 2018.

Bahkan dilaporkan, setiap tahunnya anggaran untuk pembiayaan misi tersebut mengalami peningkatan hingga akan 2,6% per tahunnya. Sehingga tak mengejutkan, jika selama setahun operasi tersebut berjalan intervensi militer AS yang dilakukan di Somalia telah menewaskan 27 orang, 2 diantaranya merupakan warga sipil. Intervensi militer yang dilakukan AS lebih menggunakan pesawat tanpa awak dan meminimalisir konflik langsung antara pasukan AS dan Al-Shabab.

Dengan terlibatnya AS dalam misi Uni Afrika, tentu menimbulkan pertanyaan terkait apa kepentingan yang mendasari AS rela membayar mahal untuk kedamaian Somalia dan membantu mereka menjadi negara yang bebas dari radikalisme dan terorisme.

Sebagai salah satu negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Amerika Serikat tentu memiliki peran terkait situasi keamanan di negara-negara anggota PBB. Tak terkecuali Somalia yang sudah meraih kemerdekaannya selama lebih dari setengah abad.

Dalam bagian sebelumnya, disebut bahwa Amerika Serikat (AS) beberapa kali mengirimkan bantuan untuk Somalia dalam hal keamanan melalui pasukan militer dan logistik perang mereka. Selain itu AS tak segan menggelontorkan banyak dana untuk membantu Somalia mendapatkan kedamaian setelah dilanda konflik berkepanjangan. Banyaknya bantuan yang diberikan AS dalam penyelesaian konflik di Somalia tentunya menimbulkan pertanyaan menarik, tentang apa yang ingin didapatkan AS dari Somalia.

AS mengajak negara-negara sekutu mereka untuk melawan terorisme didunia melalui program *Global War on Terror (GWOT)*. Salah satu kelompok teroris yang harus dilawan oleh AS adalah kelompok militan asal Somalia, yaitu Al-Shabaab. Pasalnya Al-Shabaab diketahui terus menerus melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah Somalia yang sah, TFG. Posisi Al-Shabaab sebagai kelompok teroris semakin diperkuat saat mereka menyatakan memiliki afiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda.

AS menjadikan GWOT sebagai alasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan luar negeri yang berbentuk intervensi militer. Terlebih, menyandang status Dewan Keamanan PBB membuat AS menjadi salah satu negara yang diharapkan bisa menimbulkan rasa damai bagi para negara anggota PBB lainnya.

Keluhan-keluhan dari negara lain, utamanya negara tetangga Somalia membuat AS makin gencar membantu Somalia dalam menumpas gerakan terorisme di negara tersebut. Keluhan dari negara tetangga Somalia tersebut didasari dari banyaknya warga Somalia yang mengungsi kenegara lain yang berdampak banyak bagi negara tetangga Somalia.

Meski sering dilanda bencana kekeringan hingga berakibat menderita kelaparan, Somalia disatu sisi juga terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya energi berlimpah. Somalia memiliki cadangan minyak dan gas yang belum dieksplor karena keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang kompeten.

Sejauh ini potensi minyak di Somalia hanya dieksplorasi oleh masyarakat setempat dengan peralatan seadanya. Pendanaan dari Bank Dunia pun sempat diberikan guna mengelola 70 sumur minyak di Somalia. Namun setelah pecahnya perang sipil yang dimulai sejak turunnya Siad Barre, sumur-sumur tersebut pun diabaikan.

Pada tahun 2005, Amerika Serikat melalui perusahaan migas bernama *Range Resources* mengadakan perundingan untuk membahas hak-hak asing dalam melakukan eksplorasi minyak dikawasan Puntland, Somalia.

Hingga Oktober 2005, *Range Resources* mendapatkan 2 lisensi utama dalam pengelolaan minyak dan hidrokarbon di kawasan tersebut. Perusahaan berhak menguasai eksplorasi minyak didaratan Somalia, tepatnya Blok Nugaal dan Dharoor Valley. Rentang daratan kedua wilayah tersebut ialah 14.424 km² dan 24.908 km². Tak butuh waktu lama, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut memperoleh 100% saham dikedua blok tersebut.

Dengan banyaknya wilayah yang dikuasai pihak asing, pemberontak Somalia pun melakukan penyerangan terhadap tambang tersebut. Hasilnya perang sipil kembali pecah dan menyebabkan warga yang mayoritas bekerja diperusahaan *Range Resources* tersebut melawan kelompok pemberontak tersebut.

Kondisi tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat melakukan aksi militer disekitar lokasi tersebut hingga meluas kesekian perimeter dari lokasi pertambangan tersebut. Aktifitas kelompok pemberontak yang ingin merebut kawasan pertambangan tersebut membuat Amerika Serikat menyiagakan pasukannya di Somalia.

Dalam rumusan perundingan lisensi yang dibahas antara kedua pihak, meski menguasai 100% pengeboran, perusahaan AS tersebut tetap wajib membayar biaya pengeboran untuk mengganti minyak mentah yang mereka angkut. Namun, angka yang dibayarkan oleh *Range Resources* hanya 10% dari 10.000 barrel minyak yang berhasil ditambang oleh perusahaan yang bermarkas di Texas tersebut. Setelah membayar biaya minyak mentah tersebut, *Range Resources* berhak menguasai 70% hasil dari pengeboran dan penjualan minyak tersebut.

Dalam laporan yang disampaikan *Central Intelligence Agency* (CIA), kertertarikan AS terhadap Somalia makin tinggi sejak kedua negara tersebut menandatangani sebuah perjanjian pada tahun 1980. Perjanjian tersebut memberikan izin kepada Amerika Serikat agar dapat mengakses fasilitas militer milik Somalia.

Akses yang dimaksud dalam laporan tersebut ialah fasilitas pertahanan udara dan laut yang dimiliki Somalia. Dengan demikian, Pemerintah AS dapat memiliki wewenang khusus dalam memberikan pelatihan terhadap pasukan Angkatan Udara (AU) dan

Angkatan Laut (AL) Somalia. Selain itu AS diizinkan untuk mengirimkan bantuan alat pertanian mereka untuk ditempatkan difasilitas pertahanan militer milik Somalia.

Pemerintah Somalia saat itu berniat mengembangkan perjanjian tersebut agar AS terus memberikan perhatiannya terhadap AS dan terus menyiapkan anggaran pengembangan pertahanan untuk Somalia. Presiden Somalia, Siad Barre pada 9 Maret 1980 bertolak ke Washington DC untuk bertemu dengan pemerintah AS. Dalam pertemuan tersebut Barre dilaporkan meminta AS untuk terus memberikan dukungan militer mereka dalam upaya Somalia untuk memperbaiki kondisi politik negara mereka, hingga perekonomian mereka.

Namun, rencana tersebut terus menuai kendala yang membuat bantuan pertahanan AS ke Somalia mengalami hambatan. Hal tersebut terjadi karena beberapa klan yang bermukim di Mogadishu, ibu kota Somalia menolak imbauan Barre untuk berhenti mengintervensi negara lain, seperti Kenya dan Djibouti. Selain itu, disisi lain Pemerintahan Somalia juga terus mendukung operasi pemberontakan di Ethiopia. Belum lagi ketidakmampuan Somalia dalam membayar pasukan mereka, yang membuat Somalia terus menerus mengalami pemberontakan.

Permasalahan keamanan yang terjadi di Somalia tentunya membuat AS khawatir dengan perjanjian yang sudah pernah disepakati tersebut. Bisa saja, jika gerakan militer Al-Shabab atau kelompok militan lainnya berkuasa, maka pengaruh AS akan hilang di negara itu. Sehingga AS tak lagi memiliki akses terhadap fasilitas militer AS. Apalagi diketahui bahwa sejumlah perlengkapan militer Somalia disuplai oleh perusahaan-perusahaan asal AS yang dikoordinir oleh pemerintah AS.

Tercatat dalam 2009, AS memasok 40 ton amunisi untuk *Somalia National Army* (SNA) yang ditujukan guna memerangi kelompok pemberontak di Somalia. Amunisi tersebut kemudian ditukar dengan hasil bumi Somalia berupa batu mulia dan sumber daya mineral lainnya.

Namun kenyatannya, hingga tahun 2014 AS tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan terhadap Somalia. Salah satu alasan AS mempertahankan komitmennya tersebut ialah dengan mempertimbangkan letak geografis Somalia yang sangat strategis.

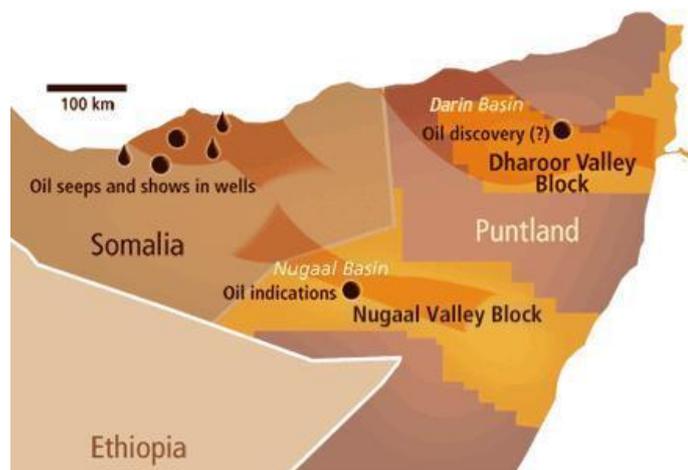
Somalia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang diseluruh benua Afrika, dengan total 3.330 kilometer. Somalia juga berbatasan langsung dengan Teluk Aden dan Samudera Hindia serta Semenanjung Arab. Semenanjung Arab merupakan pintu masuk utama menuju Laut Merah.

Menguasai Ladang Minyak di Somalia

Meski kerap kali menderita kekeringan hingga menyebabkan bencana kelaparan, Somalia disatu sisi juga terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya energi berlimpah.

Somalia memiliki cadangan minyak dan gas yang belum dieksplor karena keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang kompeten. Sejauh ini potensi minyak di Somalia hanya dieksplorasi oleh masyarakat setempat dengan peralatan seadanya.

Peta Tambang Minyak *Range Resources*



Sumber : energy-pedia.com

Pendanaan dari Bank Dunia pun sempat diberikan guna mengelola 70 sumur minyak di Somalia. Namun setelah pecahnya perang sipil yang dimulai sejak turunnya Siad Barre, sumur-sumur tersebut pun diabaikan. Somalia Ready For Exploring Oil, (diakses melalui <https://www.voanews.com/africa/somalia-readies-oil-exploration-still-working-petroleum-law> pada 21 Oktober 2019)

Mempertahankan Akses Terhadap Militer Somalia

Dalam laporan yang disampaikan *Central Intelligence Agency* (CIA), kettertarikan AS terhadap Somalia makin tinggi sejak kedua negara tersebut menandatangani sebuah perjanjian pada tahun 1980. Perjanjian tersebut memberikan izin kepada Amerika Serikat agar dapat mengakses fasilitas militer milik Somalia.

Akses yang dimaksud dalam laporan tersebut ialah fasilitas pertahanan udara dan laut yang dimiliki Somalia. Dengan demikian, Pemerintah AS dapat memiliki wewenang khusus dalam memberikan pelatihan terhadap pasukan Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) Somalia. Selain itu AS diizinkan untuk mengirimkan bantuan alat pertanian mereka untuk ditempatkan difasilitas pertahanan militer milik Somalia. (Somalia : Status of The Armed Forces, diakses melalui <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP84B00049R001303260018-3.pdf> pada 12 November 2019)

Kesimpulan

Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam konflik di Somalia terlihat sejak tahun 1990-an, saat AS termasuk dalam misi kemanusiaan yang digagas oleh PBB.

Al-Shabab dibentuk sebagai kelompok pemuda yang bertugas hanya untuk mengamankan sebuah kelompok bernama *Islamic Court Union* (ICU). Namun seiring berkembangnya

waktu, Al-Shabab justru memberontak dan menjadi kelompok teroris yang terus menerus melakukan serangan.

Selain membantu mengatasi gerakan Al-Shabab, AS juga berusaha untuk mengamankan tambang-tambang minyak Somalia yang nyaris dikuasai gerakan miltant Al-Shabab, dan klan-klan lain yang menentang pemerintah Somalia. Tidak hanya menjaga ladang minyak, AS juga diberi wewenang untuk mengelola tambang-tambang tersebut. Melalui perusahaan migas bernama *Range Resources*, AS mengadakan perundingan untuk membahas hak-hak asing dalam melakukan eksplorasi minyak dikawasan Puntland, Somalia.

Dalam dokumen CIA, pada awal tahun 1980-an, Presiden Somalia, Siad Barre memberikan AS akses khusus terhadap pangkalan udara dan laut Somalia, agar AS terus bisa memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk dukungan militer dalam upaya Barre mempertahankan kepemimpinannya di Somalia. AS tentunya tidak mau melepaskan kesempatan memiliki akses militer sebuah negara dengan cadangan minyak sebesar Somalia.

Daftar Pustaka

Buku

Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mochtar Mas'oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163 Charles. P. Kindlerberger. Op.Cit.,

Robert Jackson dan Georg Sorensen.2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. Op.Cit.

Leonard Freedman, *Power & Politics in America : Sevent Edition*, (USA: Harcourt Collage, 2000)

Media Online

Somalia's Transitinal Government diakses melalui <https://www.cfr.org/backgrounder/somalias-transitinal-government> pada 25 September 2019

Somalia's Transitinal Government diakses melalui <https://www.cfr.org/backgrounder/somalias-transitinal-government> pada 25 September 2019

Harnisch, Christopher. "The Terror Threat from Somalia: The Internationalization of Al Shabaab." Critical Threats Project, American Enterprise Institute

AL-Shabab diakses melalui <http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/61> pada 25 Desember 2019

Al-Shabab, diakses melalui <https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabab> pada 24 November 2018

CIA Handbook, Strategic, Information, Activities and Regulation, IBP Inc, 2007 USA Al Itihad Al Islamiyah, diakses melalui <https://cisac.fsi.stanford.edu/mapping/militants/profiles/al-ittihad-al-islamiya> pada 21 Oktober 2010

West, Sunguta “Somalia's ICU and its Roots in al-Ittihad al-Islami.” Diakses melalui <https://jamestown.org/program/somalias-icu-and-its-roots-in-al-ittihad-al-islami> pada 21 Oktober 2010

Somalia as a Military Target diakses melalui https://fpif.org/somalia_as_a_military_target/ pada 12 November 2019

Somalia, UNOSOM I diakses melalui <https://peacekeeping.un.org/mission/past/unosom1facts.html> pada 27 November 2019

Somalia, UNOSOM II diakses melalui <https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unosom2facts.html> pada 27 November 2019

“Paying for AMISOM: Are Politics and Bureaucracy Undermining the AU’s Largest Peace Operation?” Global Observatory, diakses melalui <https://theglobalobservatory.org/2017/01/amisom-african-union-peacekeeping-financing/> pada 11 November 2019

Somalia Intervention diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Somalia-intervention> pada 21 Oktober 2019